

SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



BPK Sumut Terima LKPD Tahun 2024 (*Unaudited*), Harapkan Pemerintah Daerah Tindaklanjuti Rekomendasi BPK

Medan, Kamis (27 Maret 2025) – Sampai dengan Kamis, 27 Maret 2025, BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara telah menerima 32 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPD) Tahun 2024 (*Unaudited*) dari Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara.

Adapun Pemerintah Daerah yang sudah melaksanakan penyampaian LKPD Tahun 2024 (*Unaudited*), yakni Pemkab Simalungun, Pemko Sibolga, Pemkab Samosir, Pemkab Humbang Hasundutan, Pemkab Toba, Pemkab Labuhanbatu Utara, Pemko Gunungsitoli, Pemkab Deli Serdang, Pemprov Sumatera Utara, Pemkab Asahan, Pemkab Padang Lawas Utara, Pemkab Nias Selatan, Pemkab Karo, Pemkab Langkat, Pemko Binjai, Pemko Padangsidimpuan, Pemko Pematangsiantar, Pemko Medan, Pemkab Tapanuli Selatan, Pemkab Batu Bara, Pemkab Dairi, Pemkab Labuhanbatu, Pemkab Labuhanbatu Selatan, Pemkab Nias, Pemkab Padang Lawas, Pemkab Pakpak Bharat, Pemkab Serdang Bedagai, Pemkab Tapanuli Utara, Pemko Tebing Tinggi, Pemkab Tapanuli Tengah, Pemkab Mandailing Natal, dan Pemkab Nias Utara.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Utara, Paula Henry Simatupang, dalam sambutannya mengapresiasi Pemerintah Daerah yang telah melaksanakan penyampaian LKPD Tahun 2024 (*Unaudited*) kepada BPK secara tepat waktu.

“Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan merupakan tujuan, tapi merupakan kewajiban (*minimum requirement*) dalam tata pemerintahan yang harus dipenuhi oleh seluruh Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Utara, untuk menjalankan pemerintahan menuju kemakmuran warga/masyarakat”, ujar Paula Henry Simatupang dalam sambutannya.

Harapan Kepala BPK Perwakilan kepada Pemerintah Daerah, dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang baik, Pemerintah Daerah harus segera menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan.

Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Sumatera Utara